

RANGKUMAN PENELITIAN



Tinjauan Penelitian Berorientasi Kebijakan untuk Perlindungan Buruh Migran Indonesia

Setiap tahunnya, ratusan ribu buruh migran perempuan Indonesia berangkat ke luar negeri untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Bagi mereka, bekerja sebagai buruh migran menjadi sumber utama penghidupan walaupun risiko yang dihadapi tidaklah kecil.

Pada awal 2015, MAMPU melakukan desk review (kajian literatur) tentang penelitian-penelitian yang berkaitan dengan perlindungan buruh migran, yang juga merupakan salah satu tema program MAMPU. Kajian yang dilakukan oleh Samuel Bazzi dan Melisa Bintoro tersebut bertujuan untuk mendalami penelitian-penelitian apa saja yang sudah tersedia serta mencari informasi tentang celah dalam ilmu pengetahuan (knowledge gap) yang penting dalam memperbaiki kebijakan perlindungan buruh migran Indonesia. Kajian tersebut juga dibuat untuk mendukung penyusunan agenda penelitian strategis MAMPU.

Kajian pustaka tersebut mencakup 22 laporan penelitian yang terdiri dari jurnal akademis, laporan dari donor, serta organisasi nasional maupun internasional yang terbit antara tahun 2004 sampai 2014. Pemilihan penelitian difokuskan pada penelitian yang berorientasi kebijakan yang menyangkut isu perlindungan buruh migran. Beberapa pertanyaan yang digunakan untuk menuntun kajian tersebut antara lain 1) Pelajaran penting apa yang bisa didapatkan dari penelitian-penelitian tentang perlindungan buruh migran yang

berorientasikan kebijakan, dan 2) Apakah ada *knowledge gap* penting yang dapat mendukung perbaikan kebijakan tentang perlindungan buruh migran.

TKI: PERAN DAN PERMASALAHANNYA

Setiap tahunnya, ratusan ribu tenaga kerja Indonesia berangkat ke luar negeri untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Pada tahun 2014 saja, terdapat sekitar 429.872¹ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berangkat ke luar negeri. Secara keseluruhan, total jumlah TKI yang masih bekerja diluar negeri tercatat sekitar 3.944.010 orang².

Penghasilan yang diperoleh TKI dari luar negeri sangatlah signifikan. Dari data terakhir yang diterima, jumlah uang yang dikirim TKI ke Indonesia pada tahun 2014 mencapai USD 8 miliar³. Jumlah yang sangat besar ini berperan penting dalam mengurangi angka kemiskinan serta membantu menggerakkan perekonomian Indonesia.

¹ BNP2TKI (2014) Available at http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_16-01-2015_020347_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_S.D_31_DESEMBER_2014.pdf

² Bank Indonesia dan BNP2TKI. Indonesian Financial Statistics. Available at http://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_30.pdf

³ Bank Indonesia dan BNP2TKI



Namun di sisi lain, bekerja di luar negeri memberikan risiko yang besar kepada TKI. Keuntungan ekonomi yang didapatkan seolah menjadi tidak signifikan karena banyaknya permasalahan yang dialami TKI. Berdasarkan survei yang dilakukan di tiga bandara utama pengirim TKI di pulau Jawa, sekitar 13.6% TKI mengalami masalah saat bekerja di luar negeri⁴.

Permasalahan yang terjadi umumnya merupakan pemutusan hubungan kerja, sakit saat bekerja, gaji yang tidak dibayarkan, pelecehan, pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, komunikasi yang buruk dan berbagai permasalahan yang mengganggu kelancaran TKI dalam bekerja.

Masih dari survei yang sama, jumlah TKI yang mengalami permasalahan menurun dari 45.749 orang pada tahun 2011 menjadi 14.487 orang pada 2013. Penurunan ini diduga terjadi karena jumlah TKI yang bekerja keluar negeri juga mengalami penurunan dikarenakan adanya moratorium ke Arab Saudi yang dimulai pada 2011. Sehingga dari statistik tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa persentase jumlah TKI yang mengalami masalah diluar negeri tidak berubah.

PIHAK YANG BERPERAN DALAM PROSES MIGRASI



Aktivitas mantan pekerja migran: membuka usaha warung rumahan

Peliknya proses yang harus dilalui TKI serta banyaknya pihak yang terlibat, mulai dari proses perekrutan TKI sampai pada keberangkatannya, menjadikan isu perlindungan TKI sebagai suatu hal yang tidak mudah.

Sponsor adalah pintu masuk bagi calon TKI dan berfungsi untuk menghubungkan calon TKI

dengan agen TKI atau Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS atau PT). Setelah TKI resmi dibawah naungan suatu PT, maka PT tersebut bertanggung jawab untuk mencocokkan TKI dengan permintaan profil pekerjaan yang disiapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. PT juga bertanggung jawab untuk menyediakan pelatihan sebelum keberangkatan TKI. Setelah TKI berangkat, agen di negara tujuan, yang merupakan rekanan dari PT, menjadi penghubung terakhir TKI dengan pemberi kerja. Pada tahap terakhir, si pemberi kerja menjadi pihak yang bertanggung jawab atas TKI selama berada di luar negeri.

Dibawah UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, beberapa kementerian dan instansi pemerintah bertanggung jawab atas proses migrasi. Yang utama adalah peran dari Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam proses pengiriman TKI ke luar negeri serta perlindungannya.

TEMUAN UTAMA

Dari kajian yang dilakukan terhadap 22 studi seputar kebijakan perlindungan buruh migran, Bazzi dan Bintoro menemukan bahwa:

1. Masih terbatasnya studi tentang perlindungan buruh migran

Penelitian tentang buruh migran Indonesia masih sangat terbatas, terutama yang berhubungan tentang masa persiapan, penempatan dan perlindungan TKI. Penelitian yang ada lebih terfokus pada pengiriman uang yang dilakukan TKI dari luar negeri.

2. Adanya keterbatasan data migrasi TKI

Terlepas dari tingginya jumlah TKI serta pentingnya peran mereka terhadap perekonomian Indonesia, saat ini belum tersedia data yang sistematis tentang angka migrasi TKI. Beberapa survei seperti *Indonesia Family Life Survey* (IFLS) dan Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) mencakup beberapa informasi yang terkait dengan TKI. Data yang tersedia antara lain sejarah migrasi dari setiap anggota rumah tangga serta jumlah pengiriman uang dari mereka yang sedang bekerja di luar negeri. Namun sampel

⁴BNP2TKI (2014)



dari survei tersebut hanya mencakup beberapa desa saja dan tidak menggambarkan keadaan di tingkat nasional.

Usaha dari BNP2TKI untuk meningkatkan ketersediaan data merupakan sebuah perkembangan yang baik. BNP2TKI menyediakan data mengenai penempatan TKI (berdasarkan jenis pekerjaan, jenis kelamin, propinsi asal, status pernikahan, tingkat pendidikan, negara tujuan dan sektor pekerjaan), tempat keberangkatan, permasalahan yang dialami, pengaduan permasalahan dan tingkat kematian. Dengan adanya data-data tersebut, diharapkan dapat membantu dalam mengawasi penempatan dan perlindungan TKI.

3. Identifikasi faktor penyebab tingginya permasalahan TKI

Kajian yang dilakukan Bazzi dan Bintoro mengidentifikasi beberapa faktor yang menjadi penyebab masih stagnerannya permasalahan TKI, yang antara lain:

Masih terbatasnya informasi yang jelas bagi para TKI mengenai kondisi kerja dan kehidupan di negara tujuan. Para TKI umumnya mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi mengenai apa yang akan mereka dapatkan dan alami pada saat bekerja di luar negeri. Para TKI juga kurang mengetahui hak dan kewajiban mereka pada saat sebelum keberangkatan sampai saat bekerja di luar negeri. Penyebab kurang informasi dapat dikaitkan dengan kurangnya pelatihan yang diberikan selama masa persiapan keberangkatan TKI⁵.

Adanya **ketergantungan yang tinggi terhadap sponsor** juga merupakan masalah bagi perlindungan TKI. Sponsor cenderung membatasi pengetahuan tentang hak dan pilihan dari TKI pada saat persiapan keberangkatan. Beberapa kasus juga menunjukkan sponsor yang meminta calon TKI untuk memberikan tanda tangan dan persetujuan tanpa diberi penjelasan yang cukup tentang konsekuensinya⁶.

Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keberangkatan TKI masih lemah. Beberapa penelitian menemukan bahwa PT yang melanggar peraturan masih dapat bebas dari hukuman dan bebas membuat perusahaan baru jika perusahaan lama mereka terkena sanksi⁷.

Beberapa **faktor lain** yang mempengaruhi lemahnya perlindungan terhadap TKI antara lain sistem desentralisasi yang lemah tidak memberi manfaat lebih bagi TKI, sulitnya koordinasi antar Negara pengirim dan negara tujuan, belum efektifnya sistem pengaduan dan penyelesaian masalah bagi TKI serta meningkatnya penggunaan jalur tidak resmi untuk pengirim uang.

REKOMENDASI PENELITIAN LANJUTAN

Pendekatan dari program MAMPU dilakukan berdasarkan bukti. Untuk mendukung program MAMPU secara umum serta kerja dari mitra-mitranya, MAMPU berusaha untuk menyediakan berbagai penelitian yang berkualitas serta data yang relevan dalam meningkatkan perlindungan TKI. Kedepannya, peluang untuk mengadakan penelitian baru dapat berkaitan dengan area yang belum memiliki sumber informasi yang cukup. Area tersebut antara lain:

- Penelitian tentang **pola hubungan** dan interaksi dari pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses keberangkatan TKI⁸. Hubungan antar TKI, sponsor, PT, agen di negara tujuan, serta pemberi kerja saat ini masih kurang jelas. Dengan mengetahui lebih jelas tentang hubungan berbagai pihak tersebut maka diharapkan permasalahan yang dialami para TKI dapat dicegah dan dikurangi.
- Biaya untuk keberangkatan TKI pada umumnya dibebankan kepada pihak yang paling lemah, dalam hal ini TKI. Berbagai isu seputar transaksi keuangan yang berhubungan proses keberangkatan TKI juga masih tidak jelas. Isu tersebut antara

⁵ Bazzi dan Bintoro (2015)

⁶ Farbenblum et al (2013), p.127

⁷ Farbenblum et al (2013) and IOM (2010)

⁸ Bazzi dan Bintoro (2015)



lain insentif yang dibayarkan PT kepada sponsor serta upah yang diberikan oleh agen diluar negeri kepada PT. Dengan mengetahui lebih lanjut mengenai **struktur biaya** yang terjadi di pasar TKI, maka pemerintah dapat membuat kebijakan yang dapat lebih melindungi TKI.

- Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengatasi **keterbatasan informasi** kepada TKI. Namun saat ini masih belum jelas jenis intervensi seperti apa yang paling efektif. Untuk membantu menjawab hal tersebut, MAMPU dapat mengadakan penelitian untuk mengetahui media penyampaian informasi seperti apa yang paling efektif bagi TKI, isi atau content dari intervensi tersebut, serta pihak mana yang lebih baik dalam menyampaikan informasi tersebut kepada TKI.
- TKI yang tidak menggunakan jalur resmi atau yang bermigrasi secara tidak sah, cenderung merupakan kelompok paling rentan dan tidak dilindungi bahkan diakui dalam UU No 39/2004. Guna mendukung dalam mengurangi angka **migrasi iregular**, MAMPU dapat mengadakan penelitian untuk mengetahui lebih dalam tentang karakteristik demografis dari TKI ilegal, faktor yang mendorong TKI untuk tidak menggunakan jalur resmi, jenis pekerjaan dari TKI ilegal dan permasalahan yang mereka alami saat bekerja di luar negeri.



Aktivitas mantan pekerja migran: budidaya rumput laut



MAMPU

Maju Perempuan Indonesia
untuk Penanggulangan Kemiskinan

Credits

Samuel Bazzi dan Melisa Bintoro (2015). Review of Policy-Oriented Research on the Protection of Indonesian Overseas Migrant Worker.

Untuk akses kepada penelitian ini, mohon hubungi program MAMPU.

Samuel Bazzi adalah Assistant Professor dari Department of Economics, Boston University dan Melisa Bintoro adalah PhD Candidate dari Department of Politics and International Studies, University of Cambridge. Keduanya terlibat dalam penelitian tentang information sharing untuk jasa penempatan luar negeri berkualitas untuk butuh migran melalui JPAL (Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab) Southeast Asia.

Pandangan dan pendapat yang ditulis dalam studi ini bersumber dari tim kajian dan tidak serta merta menggambarkan pandangan dan pendapat MAMPU maupun Pemerintah Australia. MAMPU maupun DFAT tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi yang tercantum di dalam dokumen ini.

MAMPU

Maju Perempuan Indonesia
untuk Penanggulangan Kemiskinan
Setiabudi Atrium, 3rd Floor, Suite 306
Jl HR Rasuna Said, Kav 62, Jakarta
12950 INDONESIA
T: +62 21 521 0315
F: +62 21 521 0339
E: info@mampu.or.id